

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang. Negara berkembang merupakan negara yang tingkat kesejahteraan materialnya masih tergolong rendah. Maka dari itu, saat ini Indonesia sedang gencar melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat diwujudkan melalui kegiatan pembangunan di berbagai bidang (*multidimensional*), salah satunya yakni sektor ekonomi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Kenneth L.Little dalam Kartasapoetra yaitu, pembangunan bertujuan untuk mengubah terutama ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri menuju ke bentuk ekonomi untuk pasar yang menyebabkan timbulnya ukuran-ukuran dan tujuan sosial yang berbeda dengan keadaan sediakala.¹

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita.² Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cara bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, yang dilakukan secara berkesinambungan dan terencana untuk dapat menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan

¹ Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2000), hal.123.

² Irawan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta,2002), hal.5.

Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.³ Dengan adanya otonomi daerah, dapat memberikan wewenang luas terhadap masing-masing daerah untuk bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.⁴ Sedangkan menurut Muhammad, pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting yaitu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus – menerus, usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita, dan kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.⁵ Dengan kata lain pendapatan merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengarah pada pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Hal ini diperjelas menurut Muhammad yaitu tentang *economic growth* yang diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi, yang mana ketika berbicara tentang

³ <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 03 Maret 2019, pukul 09.00 WIB.

⁴ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta:STIE YKPN,2004), hal.298.

⁵ Muhammad Hasan dan Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat:Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, (CV Nur Lina,2018), hal.8.

pembangunan maka tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kemampuan ekonomi dari manusia yang menjadi pelaku pembangunan itu sendiri, muara dari *economic growth* adalah kemakmuran yang juga dapat menjadi tanda bahwa pembangunan telah berhasil dilakukan.⁶ Oleh karena itu suatu negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.⁷ Sehingga adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (persen)
Tahun 2015 – 2017⁸

Wilayah Pulau	2015	2016	2017
Sumatera	3,53	4,29	4,30
Jawa	5,48	5,60	5,61
Bali dan Nusa Tenggara	10,42	5,92	3,73
Kalimantan	1,38	2,02	4,33
Sulawesi	8,19	7,43	6,99
Maluku dan Papua	6,28	7,40	4,89

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan perbaikan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia telah mendorong kinerja ekonomi nasional menguat. Pulau Jawa menduduki peringkat kedua dari tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2017 di angka 5,61 persen. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi di Pulau Jawa terlihat masih stabil. Salah satu Pulau Jawa yang saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan terjadi di wilayah Jawa Timur.

⁶ Muhammad Hasan dan Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal ...*, hal.8.

⁷ *Ibid.* hal.11.

⁸ <https://bps.go.id>., diakses pada tanggal 20 April 2019, pukul 10.15 WIB.

Secara nasional, Jawa Timur merupakan pemasok pangan yang terbatas sehingga kegiatan pertanian merupakan lapangan usaha yang sangat menentukan dalam struktur perekonomian Jawa Timur. Sektor lapangan usaha lainnya yang juga potensial adalah perdagangan, hotel, restoran, serta sektor industri pengolahan. Struktur kontribusi lapangan usaha yang demikian ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Timur sudah menampakkan perkembangan kearah kemandirian, yaitu perkembangan industri dan jasa yang didukung oleh pertanian yang tangguh.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha
(Persen)⁹

Lapangan Usaha	Triw I-2019 Terhadap Triw IV-2018	Sumber Pertumbuhan	Triw I-2019 Terhadap Triw I-2018	Sumber Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,81	1,32	-0,28	-0,03
Pertambangan dan Pengalihan	-5,48	-0,30	2,24	0,12
Industri Pengolahan	0,67	0,20	7,28	2,18
Pengadaan Listrik dan Gas	-1,89	-0,01	-4,13	-0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,41	0,00	5,44	0,01
Konstruksi	-7,42	-0,73	5,83	0,53
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,27	-0,05	6,70	1,22
Transportasi dan Pergudangan	-2,67	-0,08	3,70	0,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,26	-0,01	6,87	0,37
Informasi dan Komunikasi	0,02	0,00	6,41	0,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,83	0,05	3,44	0,09
Real Estat	0,47	0,01	5,48	0,10
Jasa Perusahaan	0,85	0,01	6,27	0,05

⁹ <https://jatim.bps.go.id>., diakses pada tanggal 20 April 2019, pukul 12.41 WIB.

Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-7,22	-0,16	5,15	0,11
Jasa Pendidikan	-4,34	-0,12	6,10	0,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,40	0,00	7,86	0,05
Jasa Lainnya	0,10	0,00	5,77	0,08
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0,13	0,13	5,51	5,51

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Timur triwulan I-2019 tumbuh sebesar 0,13 persen dengan didukung oleh kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 14,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menempati posisi pertama sebagai penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Bruto Jawa Timur. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukkan bahwa negara tersebut masih tergolong atau termasuk negara agraris dan perannya besar sekali karena merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya.¹⁰

Secara umum bahwa pengertian petani merujuk pada suatu lapisan atau golongan dalam masyarakat yang mencari dan memperoleh nafkah kehidupannya dari usaha pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat diperbarui mulai dari tanaman, hewan ternak, dan ikan atau biota laut baik sebagai usaha pokok satu-satunya maupun dilengkapi usaha-usaha lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian yang memiliki nilai strategis di dalam memenuhi kebutuhan pangan

¹⁰ Tati Nurmala dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2012), hal.95.

yang terus meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pendapatan sehingga konsumsi pangan meningkat.¹¹

Salah satu komponen dari subsektor peternakan yang memiliki banyak manfaat dan berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah agrobisnis persusuan. Kondisi geografis, ekologi, dan kesuburan lahan di beberapa wilayah Indonesia memiliki karakteristik yang cocok untuk pengembangan agrobisnis persusuan. Selain itu, dari sisi konsumsi, produksi susu dalam negeri masih belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Saat ini produksi dalam negeri baru bisa memasok tidak lebih dari 21% dari konsumsi nasional, sisanya 79% berasal dari impor.¹²

Tingginya impor susu dari luar negeri mengakibatkan timbulnya kerugian langsung pada peternak sapi perah di Indonesia. Selain itu banyak dari impor susu menyebabkan terkurasnya devisa nasional, hilangnya kesempatan terbaik (*opportunity loss*) yang berasal dari mengagurnya atau tidak dimanfaatkannya potensi sumberdaya yang ada untuk pengembangan agrobisnis persusuan, serta hilangnya potensi *revenue* yang seharusnya diperoleh pemerintah dari pajak apabila agrobisnis persusuan dikembangkan dengan baik. Mengingat potensi sumberdaya alam Indonesia yang besar bagi pengembangan agrobisnis persusuan, ironis jika sebagian besar dari kebutuhan susu di Indonesia masih harus diimpor. Hal ini menyatakan, sudah sewajarnya bila pemerintah dan *stakeholder* lainnya perlu berupaya keras meningkatkan

¹¹ Titin Agustina, *Outlook Komoditas Pertanian Subsektor Peternakan Susu*, (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2016), hal.3.

¹² *Ibid.*

pangsa pasar (*market share*) para pelaku pasar domestik dalam agrobisnis persusuan Indonesia.

Mengingat susu merupakan salah satu komoditas internasional yang banyak dibutuhkan masyarakat di seluruh dunia, subsektor peternakan diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia. Memanfaatkan sumberdaya yang berpotensi pada susu sapi perah ini sesuai dengan yang terkandung dalam Al Qur'an Surah Yasin ayat 72-73 :

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا
مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

*Artinya : “Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman”.*¹³

Ayat diatas berartikan bahwa Allah SWT telah memberikan nikmat yang dilimpahkan kepada manusia berupa binatang-binatang ternak ditundukkan-Nya bagi mereka. Hal ini menandakan bahwa binatang yang telah Allah ciptakan mempunyai manfaat tersendiri untuk manusia supaya digunakan seperlunya.

Jawa Timur memiliki potensi penghasil susu sapi perah yang sangat tinggi, dengan produksi susu sapi perah di tahun 2017 sebesar 498.915.773 (kg).¹⁴ Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:PT Kumudasmora Grafindo,1994), hal.401.

¹⁴ <https://disnak.jatimprov.go.id>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 20.00 WIB.

Timur yang memiliki potensi ternak sapi perah cukup banyak. Dibuktikan dengan tabel ternak besar di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

Tabel 1.3
Ternak Besar Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Tulungagung 2017¹⁵

	Kecamatan	Sapi	Sapi Perah	Kerbau	Kuda
1	Besuki	2.141	0	4	0
2	Bandung	2.008	0	15	2
3	Pakel	4.506	0	0	0
4	Campurdarat	4.519	0	0	0
5	Tanggunggunung	5.653	0	0	0
6	Kalidawir	9.717	128	29	0
7	Pucanglaban	3.674	0	0	0
8	Rejotangan	10.399	2.287	11	7
9	Ngunut	8.026	589	14	2
10	Sumbergempol	11.588	112	0	1
11	Boyolangu	4.211	0	0	0
12	Tulungagung	368	0	5	2
13	Kedungwaru	6.241	36	0	1
14	Ngantru	11.597	21	0	9
15	Karangrejo	5.792	0	62	0
16	Kauman	3.602	0	75	7
17	Gondang	6.185	41	28	10
18	Pagerwojo	5.954	9.697	115	0
19	Sendang	8.375	12.444	28	0
	Tulungagung	114.556	25.355	386	41

Dari tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Sendang merupakan salah satu sentra peternakan sapi perah tertinggi di Kabupaten Tulungagung, terbukti dari jumlah kepemilikan ternak sapi perah sebesar 12.444 ekor. Hal ini didukung dengan wilayah Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian tempat antara 450 M sampai dengan 1.150 M dari permukaan air laut.¹⁶ Dengan penduduk Kecamatan Sendang tahun 2017 menurut proyeksi hasil Sensus

¹⁵ <https://tulungagungkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul 20.15 WIB.

¹⁶ <https://kudtaniwilis.com>, diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul 09.00 WIB.

Penduduk Tahun 2010, sebanyak 44.574 jiwa yang terbagi atas laki-laki 22.141 jiwa dan perempuan 22.433 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 536 jiwa/km².¹⁷

Meskipun Kecamatan Sendang termasuk wilayah pedesaan, namun tingkat kualitas jangan sampai diragukan. Dari data tersebut dapat dimanfaatkan menjadi suatu yang lebih bernilai guna untuk membangun perekonomian masyarakat yang lebih baik meskipun lingkup wilayahnya yang lebih kecil yaitu daerah pedesaan. Sesuai dengan yang dikutip dari Hadi Sumarsono, bahwa di era otonomi daerah pembangunan ekonomi lokal pasti berbasis pada potensi lokal daerah dengan skala prioritas pembangunan daerah harus ditetapkan baik secara sektoral maupun spasial dalam skala lebih kecil yaitu di tingkat wilayah desa atau kecamatan.¹⁸

Untuk pembangunan ekonomi masyarakat desa, diperlukan adanya suatu lembaga penguat untuk memperlancar sekaligus membimbing para peternak untuk lebih maju dan mampu berdaya saing dengan sektor lainnya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Todaro dalam Muhammad, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan, sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan – perubahan besar dalam struktur sosial, sikap – sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga – lembaga nasional termasuk pula percepatan

¹⁷ <https://tulungagungkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019, pukul 10.00 WIB.

¹⁸ Hadi Sumarsono dkk, *Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah*, (Malang:Gunung Samudera,2017), hal.2.

pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut.¹⁹

Pendapat diatas menjelaskan bahwa lembaga sebagai salah satu program alternatif dari pembangunan ekonomi. Lembaga yang sering kita temui di pedesaan adalah lembaga koperasi. Sebagaimana yang dikutip dari Cornelius Rintuh, bahwa salah satu lembaga ekonomi yang mampu memberikan kesempatan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat di pedesaan untuk meningkatkan usaha dengan kebutuhan serta sekaligus memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka adalah koperasi.²⁰

Menurut Wijaya dalam Sirilius Nafanu, manfaat berkoperasi adalah membantu meningkatkan standar sosial ekonomi di daerah dengan memanfaatkan potensi dan penyerapan tenaga kerja, bermanfaat langsung karena sesuai dengan kehidupan masyarakat pedesaan, dan ekonomi pedesaan bisa tumbuh karena koperasi berakar kuat di pedesaan.²¹ Sedangkan peran pembangunan masyarakat desa itu dapat dilakukan melalui Koperasi Unit Desa, hal ini diperkuat dengan pendapat Eugene Staley dalam Kartasapoetra bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang menjamin berkembangnya demokrasi, maka satu-satunya alat ekonomi dan sosial yang mengandung nilai-nilai kedemokrasian itu adalah koperasi, yang di pedesaan berkat dorongan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa telah dibentuk oleh

¹⁹ *Ibid*,hal.8.

²⁰ Cornelis Rintuh dan Miara, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta,2005), hal.58.

²¹ Sirilius Nafanu, "Model Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Berbasis Agribisnis di Pedesaan Swapraja Biboki", *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, 2016, ISSN 2502-1710, hal.30, <https://scolar.google.co.id>., diakses pada tanggal 10 April 2019, pukul 12.00 WIB.

warga desanya yaitu Koperasi Unit Desa (KUD).²² Sudarsono dan Edilius mendefinisikan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan.²³

Di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, terdapat suatu lembaga Koperasi Unit Desa (KUD) yang terbesar yaitu Koperasi Unit Desa Tani Wilis. Koperasi Unit Desa Tani Wilis memiliki unit usaha utama yaitu ada di produksi susu sapi perah. Hal ini disesuaikan dengan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya yaitu sebagai peternak sapi perah. Dari kegiatan unit usaha yang dijalankan, ternyata KUD ini mampu menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat desa terutama para anggota koperasi yang berdampak positif pula pada masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan pendapatan sisa hasil usaha dari Koperasi Unit Desa Tani Wilis.

Tabel 1.4 :
Perkembangan Volume Usaha dan Pencapaian Sisa Hasil Usaha (SHU)
KUD Tani Wilis²⁴

No.	Tahun	Volume Usaha	Sisa Hasil Usaha (SHU)
1	2002	20.378.784.359,66	96.925.370,66
2	2003	25.173.318.957,00	88.389.263,00
3	2004	23.606.695.859,29	73.050.083,70
4	2005	22.974.264.974,71	75.712.284,39
5	2006	24.107.741.345,93	92.098.512,33
6	2007	27.448.716.200,09	112.933.703,22
7	2008	38.311.464.461,84	104.147.618,82
8	2009	31.645.462.134,60	112.223.492,92
9	2010	37.524.331.137,45	200.151.433,12

²² G.Kartasapoetra dkk, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2001), hal.211.

²³ Sudarsono dan Edilius,*Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,2007), hal.45.

²⁴ Dokumentasi dari Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Tani Wilis Tahun 2018, pada tanggal 05 Juli 2019.

10	2011	44.681.645.881,52	224.266.595,36
11	2012	47.425.718.222,92	291.069.465,89
12	2013	56.384.239.424,81	344.511.894,31
13	2014	66.118.160.731,18	430.680.963,56
14	2015	71.978.105.543,27	472.522.953,13
15	2016	78.751.891.990,60	504.651.735,26
16	2017	119.469.084.254,30	763.153.843,07
17	2018	122.734.238.291,10	796.048.922,00

Dari tabel 1.4 diatas, menunjukkan bahwa perkembangan volume usaha dan sisa hasil usaha sempat mengalami penurunan di tahun 2009, namun melonjak naik pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Wilis berhasil dalam menaikkan pendapatan masyarakat yang turut bergabung dalam koperasi. Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat tersebut, bertandakan adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berartikan menuju kesejahteraan masyarakat dan bertujuan pula pada proses memperlancar pembangunan ekonomi masyarakat yang lebih baik.

Oleh karena itu, Koperasi Unit Desa sebagai pimpinan kolektif masyarakat dapat menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat, sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat desa. Dari pemaparan diatas, penulis tertatik untuk mengaktualisasikan bagaimana strategi Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut mampu membangun perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan. Dari latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul ***“Strategi Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Koperasi Unit Desa Tani Wilis Berbasis Agrobisnis di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung”***.

B. Fokus Penelitian

Dari latarbelakang masalah di atas, peneliti menemukan sesuatu yang menarik yaitu mengenai kemampuan KUD Tani Wilis dalam membangun ekonomi masyarakat setempat, sehingga peneliti menyimpulkan fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui Koperasi Unit Desa Tani Wilis berbasis agrobisnis di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja kendala dan solusi dari strategi pembangunan masyarakat desa melalui Koperasi Unit Desa Tani Wilis berbasis agrobisnis di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana dampak dari strategi pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui Koperasi Unit Desa Tani Wilis berbasis agrobisnis di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana strategi pembangunan ekonomi masyarakat desa yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Wilis berbasis agrobisnis. Dan menggali apa saja kendala dan bagaimana solusi dari Koperasi Unit Desa (KUD) dalam menghadapi kendala pembangunan ekonomi masyarakat desa dengan berbasis agrobisnis. Serta mengetahui dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari adanya strategi Koperasi Unit

Desa (KUD) dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa berbasis agrobisnis.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi suatu masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) belum sepenuhnya berperan aktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa.
- b. Banyaknya kendala dalam upaya untuk pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui Koperasi Unit Desa (KUD).
- c. Kurangnya peranan koperasi dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat desa, khususnya wilayah seperti Kecamatan Sendang yang hanya mengandalkan hasil dari panen untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih fokus dan tidak terjadi salah penafsiran antara peneliti dan pembaca. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai strategi pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) berbasis agrobisnis.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mempunyai dua hal kegunaan yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan

mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kegunaan hasil penelitian terhubung dengan sarana-sarana yang diajukan setelah kesimpulan. Kegunaan hasil penelitian merupakan *follow up* pengguna informasi yang di dapat dari kesimpulan.²⁵ Dari hasil penelitian yang saya lakukan mempunyai beberapa manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan, pengembangan keilmuan di bidang ekonomi pembangunan khususnya masalah pembangunan ekonomi, serta diharapkan dapat dijadikan acuan secara teoritis.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Koperasi

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi Koperasi Unit Desa (KUD) untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi masalah mengenai startegi pembangunan ekonomi masyarakat desa.

b. Bagi Akademik

Sebagai tambahan ilmu dan informasi untuk penelitian selanjutnya dengan bidang yang sama dan sebagai perbendaharaan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

²⁵ Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hal.6.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga merupakan bahan informasi tentang pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui Koperasi Unit Desa (KUD) berbasis agrobisnis.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.²⁶

b. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.²⁷

²⁶ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal.13.

²⁷ *Ibid.* hal.298.

c. Koperasi Unit Desa (KUD)

Sudarsono dan Edilius mendefinisikan KUD sebagai organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan.²⁸

d. Agrobisnis

Agrobisnis dari cara pandang ekonomi ialah usaha penyediaan pangan. Pendekatan analisis makro memandang agrobisnis sebagai unit sistem industri dan suatu komoditas tertentu, yang membentuk sektor ekonomi secara regional atau nasional. Sedangkan pendekatan analisis mikro memandang agrobisnis sebagai suatu unit perusahaan yang bergerak, baik dalam salah satu subsistem agrobisnis, baik hanya satu atau lebih subsistem dalam satu lini komoditas atau lebih dari satu lini komoditas.²⁹

e. Ekonomi Pembangunan

Ekonomi pembangunan adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi.³⁰

²⁸ Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia...*, hal.45.

²⁹ Silvana Maulidah, *Pengantar Manajemen Agribisnis*, (Malang:UB Press,2012), hal.5.

³⁰ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal.6.

2. Secara Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Yang dimaksud strategi pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui KUD berbasis agrobisnis adalah bagaimana strategi manajemen dari Koperasi Unit Desa (KUD) khususnya KUD Tani Wilis terhadap pembangunan ekonomi masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal melalui kegiatan agrobisnis yang ada di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan enam bab, masing – masing bab terdiri dari beberapa sub atau bagian dan sebelum memakai bab pertama, lebih dahulu penulis sajikan beberapa bagian awal yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Kemudian bagian isi yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari : deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konsep.

- BAB III Metode Penelitian, terdiri dari : pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahap-tahap penelitian.
- BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari : deskripsi data, temuan penelitian
- BAB V Pembahasan Hasil Penelitian, terdiri dari : pembahasan data dari hasil penelitian.
- BAB VI Penutup, terdiri dari : kesimpulan pembahasan, saran.

Dan di bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.